



DPRD DIJ

## Desak BKK Danais Naik Jadi Rp 120 Juta

**JOGJA** - Di tengah pemotongan anggaran dana desa (DD), Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto justru meminta agar alokasi bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan (Danais) di Kota Jogja meningkat menjadi Rp120 juta per kalurahan.

Dana tersebut digunakan untuk penanganan *stunting* pada 2026. "Kami berkomitmen mendorong kebijakan pembangunan benar-benar dialokasikan untuk program pro rakyat," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/1).

Anggaran tersebut meningkat Rp 20 juta dari tahun sebelumnya. Dasar aturan untuk program kesejahteraan masyarakat itu berlandaskan pada Perda 3/2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan serta Perdais 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan. "Untuk itu harus segera lakukan penguatan kelembagaan di tingkat kalurahan/ kelurahan," ucap anggota DPRD DIJ Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kota Jogja itu.

Penguatan lembaga di tingkat kelurahan, lanjutnya wajib dilakukan salah satunya dengan mendorong dilakukannya perubahan Perda Perangkat Daerah di Kota Jogja.

Perlu segera dibentuk kelurahan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), tujuannya agar APBD DIJ, khususnya Danais dapat dialokasikan secara maksimal di tingkat kelurahan melalui BKK Kota Jogja. "Selama ini lurah dan jajaran sebagai unsur staf kemantren (kecamatan) memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola anggaran di kelurahan," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja ini.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Jogja Aan Iswanti mengatakan, perlunya dalam mengatasi *stunting*. Pendampingan keluarga dari kelurahan di masing-masing kemantren menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan bebas *stunting*. "Angka *stunting* di Kota Jogja turun dari 12 persen menjadi 8,6 persen," ujarnya. (oso/wia/fj)

## Desak BKK Danais Naik Jadi Rp 120 Juta

**JOGJA** - Di tengah pemotongan anggaran dana desa (DD), Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto justru meminta agar alokasi bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan (Danais) di Kota Jogja meningkat menjadi Rp120 juta per kalurahan.

Dana tersebut digunakan untuk penangan *stunting* pada 2026. "Kami berkomitmen mendorong kebijakan pembangunan benar-benar dialokasikan untuk program pro rakyat," ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (18/1).

Anggaran tersebut meningkat Rp 20 juta dari tahun sebelumnya. Dasar aturan untuk program kesejahteraan masyarakat itu berlandaskan pada Perda 3/2024 tentang Pemajuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Kelurahan serta Perda 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan, "Untuk itu harus segera lakukan penguatan kelembagaan di tingkat kalurahan/kelurahan," ucap anggota DPRD DIJ Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kota Jogja itu.

Penguatan lembaga di tingkat kalurahan, lanjutnya wajib dilakukan salah satunya dengan mendorong dilakukannya perubahan Perda Perangkat Daerah di Kota Jogja.

Perlu segera dibentuk kalurahan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD), tujuannya agar APBD DIJ, khususnya Danais dapat dialokasikan secara maksimal di tingkat kalurahan melalui BKK Kota Jogja. "Selama ini lurah dan jajaran sebagai unsur staf kemantren (kecamatan) memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengelola anggaran di kalurahan," ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jogja ini.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Jogja Aan Iswanti mengatakan, perlunya dalam mengatasi *stunting*. Pendampingan keluarga dari kalurahan di masing-masing kemantren menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan bebas *stunting*. "Angka *stunting* di Kota Jogja turun dari 12 persen menjadi 8,6 persen," ujarnya. (oso/wia/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005